



## Efektifitas Program Perluasan Dan Penempatan Tenaga Kerja Terhadap Penurunan Angka Pengangguran Di Kepulauan Riau

**Rachel Damayanti Gultom**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Karmi Octaviani**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Sri Wahyuni**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: [racheldamayanti60@gmail.com](mailto:racheldamayanti60@gmail.com)

**Abstract.** *The research purposes to determine effectiveness of the Manpower Expansion and Placement Program towards reducing the unemployment rate in the Riau Islands. This research is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out by literature and documentation studies which are collecting data from records, administration, documents, books, and scientific works. Data analysis techniques were by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of the study are seen from the achievement of effectiveness indicators, namely a good understanding of the program because there is community participation and collaboration with various parties, target accuracy are running well because there is absorption of job vacancies, the timeliness of the program for a year, the achievement of goals by decreasing the unemployment rate even though it is not too much, and real changes in the impact of job training so that people have jobs and are placed according to their experience.*

**Keywords:** *Effectiveness, Program, Unemployment*

**Abstrak.** Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui Efektifitas Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Terhadap Penurunan Angka Pengangguran di Kepulauan Riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari catatan, administrasi, dokumen, buku, dan karya ilmiah. Teknis analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian, data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dilihat dari pencapaian indikator efektivitas yaitu pemahaman program yang sudah baik karena terdapat partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pihak, indikator ketepatan sasaran berjalan dengan baik karena terjadi penyerapan lowongan pekerjaan, ketepatan waktu program tersebut selama setahun, tercapainya tujuan dengan menurunnya angka pengangguran walau tidak terlalu banyak, dan perubahan nyata dampak dari pelatihan kerja sehingga masyarakat memiliki pekerjaan dan ditempatkan sesuai pengalamannya.

**Kata kunci:** *Efektivitas, Program, Pengangguran*

## **LATAR BELAKANG**

Masalah pengangguran memiliki pengaruh terhadap bidang perekonomian sehingga kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta terwujudnya pendapatan potensial akan terhambat. Pengangguran merupakan sebutan yang digunakan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, yang ingin mendapatkan pekerjaan, yang bekerja di bawah dua hari, ataupun yang masih mencari pekerjaan layak (Hariyanto, 2020). Negara-negara selalu berkeinginan agar angka pengangguran di negaranya dapat berkurang dari waktu ke waktu agar tidak mempengaruhi perekonomian serta masyarakatnya (Sugianto & Permadhy, 2020).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun sebesar 0,54 persen dari tahun 2022. Di tahun 2022 ada sekitar 5,86 persen jumlah TPT Indonesia dan saat ini menurun menjadi 5,32 persen. Hal ini mempengaruhi jumlah angkatan kerja di Indonesia yang semakin bertambah. Dalam satu tahun dari Agustus 2022 hingga Agustus 2023 telah bertambah jumlah angkatan kerja sebanyak 3.990.000 di Indonesia. Selain itu, usaha di bidang akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar lapangan pekerjaan sebanyak 1.800.000. Pada tahun 2024 pemerintah telah menargetkan angka pengangguran di Indonesia menurun hingga di angka 4-4,6 persen. Artinya, data sebelumnya telah menunjukkan bahwa terjadi penyerapan terhadap lapangan pekerjaan yang tersedia oleh angkatan kerja dengan penurunan jumlah TPT meskipun pencapaian tahun ini masih jauh dari angka harapan di tahun 2024.

Untuk mengupayakan target TPT di Indonesia pada 2024, Provinsi Kepulauan Riau turut mengencangkan programnya dalam berpartisipasi untuk menurunkan angka pengangguran di Indonesia (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, 2022). Salah satu program tersebut adalah program perluasan dan penempatan tenaga kerja di Kepulauan Riau. Program ini dijalankan secara rutin oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang fungsinya sebagai pelaksana atas pelatihan dan penempatan kerja, mengawasi ketenagakerjaan dan hubungan industrialnya, melakukan pembinaan masyarakat, serta mempersiapkan tempat transmigrasi. Terkhusus pada ketenagakerjaan, mereka memperhatikan tingkat pengangguran terbuka dan perbandingannya dengan angka angkatan kerja di Kepulauan Riau. Sebagaimana terjadi di tahun 2020 saat Covid-19 melanda, TPT Kepulauan Riau meningkat jumlahnya menjadi 10,24 persen jauh dari target yakni 6,74 persen. Pada tahun tersebut memang terjadi perguncangan ekonomi menyebabkan dampak negatif pada ketenagakerjaan. Namun, pada

tahun 2021 perlahan angka TPT Kepulauan Riau kembali menurun menjadi 9,91 persen dan di tahun 2022 menurun kembali hingga pada 8,23 persen.

**Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Indonesia**

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)			
	2020	2021	2022	2023
Aceh	6,59	6,3	6,17	6,03
Sumatera Utara	6,91	6,33	6,16	5,89
Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	5,94
Riau	6,32	4,42	4,37	4,23
Jambi	5,13	5,09	4,59	4,53
Sumatera Selatan	5,51	4,98	4,63	4,11
Bengkulu	4,07	3,65	3,59	3,42
Lampung	4,67	4,69	4,52	4,23
Kep. Bangka Belitung	5,25	5,03	4,77	4,56
Kep. Riau	10,34	9,91	8,23	6,8
DKI Jakarta	10,95	8,5	7,18	6,53
Jawa Barat	10,46	9,82	8,31	7,44
Jawa Tengah	6,48	5,95	5,57	5,13
DI Yogyakarta	4,57	4,56	4,06	3,69
Jawa Timur	5,84	5,74	5,49	4,88
Banten	10,64	8,98	8,09	7,52
Bali	5,63	5,37	4,8	2,69
Nusa Tenggara Barat	4,22	3,01	2,89	2,8
Nusa Tenggara Timur	4,28	3,77	3,54	3,14
Kalimantan Barat	5,81	5,82	5,11	5,05
Kalimantan Tengah	4,58	4,53	4,26	4,1
Kalimantan Selatan	4,74	4,95	4,74	4,31
Kalimantan Timur	6,87	6,83	5,71	5,31
Kalimantan Utara	4,97	4,58	4,33	4,01
Sulawesi Utara	7,37	7,06	6,61	6,1
Sulawesi Tengah	3,77	3,75	3	2,95
Sulawesi Selatan	6,31	5,72	4,51	4,33
Sulawesi Tenggara	4,58	3,92	3,36	3,15
Gorontalo	4,28	3,01	2,58	3,06
Sulawesi Barat	3,32	3,13	2,34	2,27
Maluku	7,57	6,93	6,88	6,31
Maluku Utara	5,15	4,71	3,98	4,31
Papua Barat	6,8	5,84	5,37	5,38
Papua	4,28	3,33	2,83	2,67
Indonesia	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa Provinsi Kepulauan Riau berada di tingkat ketiga teratas dengan kasus pengangguran terbanyak sebelum Provinsi Banten dan Jawa Barat kemudian diikuti DKI Jakarta di urutan keempat pada tahun 2023. Ini menjadi perhatian penting untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau sehingga banyak program yang diupayakan untuk menurunkan angka tersebut salah satunya dengan program perluasan serta pemerataan tenaga kerja. Program ini dilakukan karena kesadaran pemerintah akan kurang berkembangnya inovasi perluasan lapangan kerja Kepulauan Riau serta lemahnya produktivitas penduduk.

**Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau**

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka			
	2019	2020	2021	2022
Karimun	5,83	8,36	7,2	6,87
Bintan	8,68	8,86	8,62	6,91
Natuna	3,82	4,1	5,15	4,15
Lingga	4,35	4,41	4,23	3,09
Kepulauan Anambas	3,21	3,44	1,27	2,15
Batam	8,31	11,79	11,64	9,56
Tanjungpinang	6,31	9,3	6,31	5,27

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023

**Tabel 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kepulauan Riau**

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			
	2019	2020	2021	2022
Karimun	57,74	59,76	60,86	60,46
Bintan	61,85	61,28	63,19	66,04
Natuna	66,65	69,39	72,31	67,89
Lingga	64,72	64,56	64,49	65,11
Kepulauan Anambas	63,18	68,4	70,3	71,64
Batam	66,46	62,46	68,33	62,56
Tanjungpinang	71,06	60,56	71,24	65,37

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023

Dari Tabel 2 dan 3 telah tersaji data pengangguran sekaligus tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau sampai pada tahun 2022. Kota Batam memiliki persentase angka pengangguran terbanyak namun tidak diikuti tingkat partisipasi angkatan kerjanya yang tinggi. Sedangkan Kepulauan Anambas memiliki persentase pengangguran yang lebih kecil dari kabupaten dan kota lainnya di Kepulauan Riau sekaligus mengungguli dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi dari kabupaten dan kota lainnya. Ketidakmerataan ini menjadi perhatian peneliti sehingga tujuan penelitian ini adalah mengetahui Efektifitas

Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Terhadap Penurunan Angka Pengangguran di Kepulauan Riau.

## **KAJIAN TEORITIS**

Landasan teori yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah efektivitas program. Efektivitas program adalah kemampuan lembaga atau instansi yang terkait dalam menyelenggarakan programnya tepat waktu, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat (Wulandari & Simon, 2019). Teori untuk mengukur efektivitas program menurut Edi Sutrisno dalam (Arlan, 2019) diuraikan dalam 5 indikator berbeda yaitu:

### **1. Pemahaman program**

Pemahaman program merupakan indikator yang menilai bagaimana sebuah program yang ingin diselenggarakan dapat dipahami sekaligus diterima oleh masyarakat atau pihak sasaran. Pemberian pemahaman ini diusahakan oleh pihak penyelenggara program untuk masyarakat. Kemudian keefektifan program akan dilihat dengan menilai pengetahuan serta pemahaman masyarakat terkait program yang dilaksanakan. Hal ini akan meningkatkan perhatian penyelenggara program terhadap kelompok sasaran sehingga program bisa berjalan mudah sekaligus terorganisir.

### **2. Ketepatan Sasaran**

Menilai ketepatan sasaran suatu program sangat penting karena sifatnya mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Indikator ini menjadikan masyarakat sebagai tolok ukur apakah program tersebut diterima dan memberikan dampak bagi masyarakat. Program yang diselenggarakan harus berpegang pada pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh sebab itu perlu tinjauan terhadap keberlangsungan program agar sasaran tetap mengutamakan masyarakat. Indikator ketepatan sasaran menilai keberhasilan lembaga mengimplementasikan programnya berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan.

### **3. Ketepatan Waktu**

Setiap program yang direncanakan telah ditetapkan jangka waktu pelaksanaannya. Program-program tersebut dapat disebut efektif apabila diselenggarakan tepat waktu, penggunaan waktu yang terencana, serta mencapai sasaran pada akhir pelaksanaan. Ketepatan waktu dapat menunjukkan apakah lembaga yang menyelenggarakan program tersebut menggunakan waktunya dengan baik. Keberhasilan suatu program dapat dikatakan baik bila dijalankan serta diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Semakin tepat waktu yang dimanfaatkan, maka semakin tepat juga keefektifan program.

#### **4. Tercapainya Tujuan**

Ketercapaian tujuan dilihat keefektifannya dari sejauh mana program tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada saat perancangan. Ketercapaian tujuan dinilai melalui kesesuaian target oleh sebab itu proses pelaksanaan memerlukan perhatian lebih karena akan mempengaruhi keberhasilan program.

#### **5. Perubahan Nyata**

Indikator ini terfokus pada manfaat, dampak, atau efek yang diterima masyarakat lewat program yang dijalankan oleh institusi tersebut. Program yang berjalan dengan efektif tentu memberikan manfaat serta dampak yang baik bagi kehidupan serta kebutuhan masyarakat termasuk kemajuan ekonomi, lingkungan, bahkan sarana prasarana. Indikator ini lebih memfokuskan pada bentuk perubahan nyata yang terjadi di masyarakat dengan adanya program tersebut. Oleh sebab itu, selain ketercapaian tujuan dampak program terhadap masyarakat juga menentukan keberhasilan program.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang sering digunakan untuk menjabarkan deskripsi terhadap sebuah fenomena yang terjadi di kehidupan sosial secara objektif (Purba & Simanjuntak, 2011). Dengan metode dan pendekatan ini, peneliti akan berusaha menyampaikan fakta dan informasi berdasarkan data yang ada sekaligus memberikan simpulan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi. Dalam teknik pengumpulan sumber data peneliti melakukan studi dokumentasi dan literatur terhadap dokumen-dokumen yang dibebaskan akses oleh pemerintah serta sumber-sumber buku dan jurnal. Dokumen tersebut memuat data lengkap terkait angka angkatan kerja, angka tingkat pengangguran terbuka, angka lowongan pekerjaan yang terdaftar, angka pencari pekerjaan yang terdaftar, sehingga mampu menjawab rumusan penelitian ini. Adapun studi literatur dan dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari catatan, dokumen, buku, karya ilmiah, dan administrasi yang tersedia di website resmi Badan Pusat Statistik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, serta Badan Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Provinsi Kepulauan Riau. Menggunakan teknik analisis yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah program dapat dikatakan efektif jika dalam pengimplementasiannya berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Efektifitas terlihat melalui bagaimana cara penyelenggara program dalam menindaklanjuti rumusannya hingga sejauh apa program tersebut mencapai sasaran (Anis et al., 2021). Kemampuan program terkaca lewat dampaknya, pengaruhnya, akibat, serta hasil yang dirasakan oleh orang banyak. Penilaian efektivitas dianggap menjadi salah satu cara menentukan hasil akhir program untuk mengukur keefektifan (Abdul et al., 2022). Sehingga pada penelitian ini menggunakan empat indikator ukuran efektifitas dari Sutrisno (2007) yakni diantaranya, pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

### 1. Pemahaman Program

Pemahaman program adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman penyelenggara terhadap program yang mereka rumuskan, memahami tanggungjawabnya dengan baik, dan juga pemahaman masyarakat umum. Dalam Rencana Kerja 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau telah menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengusulkan program untuk mensukseskan perluasan serta penempatan tenaga kerja. Hal-hal tersebut adalah melakukan sosialisasi terkait UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelatihan *Practical Office Advance*, pelatihan dan sertifikasi *service AC*, pelatihan dan sertifikasi K3 umum, pelatihan las, pelatihan dan sertifikasi alat berat, pelatihan keahlian untuk pemuda angkatan kerja, pelatihan untuk pelaut pemula, pelatihan menjahit, pelatihan bagi anak-anak yang putus sekolah, fasilitasi hubungan industri, dan sebagainya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memahami tugasnya sebagai penyelenggara program dengan menentukan penganggaran program di setiap tahun. Di tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan anggaran sebesar 1.950.000.00 untuk menjalankan program perluasan dan pemerataan tenaga kerja. Pemerintah juga menyadari ada faktor-faktor yang perlu dioptimalkan dan menjadi perhatian khusus, yaitu:

- a. Produktifitas kerja belum optimal
- b. Terbatasnya dana untuk melaksanakan pelatihan kerja dibandingkan jumlah kebutuhan
- c. Mekanisme, sistem, serta sarana prasarana informasi terkait lowongan pekerjaan belum efektif
- d. Inovasi perluasan lapangan pekerjaan di sektor informal tidak berkembang sehingga pemuda atau angkatan kerja yang baru selesai pendidikan tidak tertarik
- e. Penciptaan lapangan kerja yang belum optimal

f. Dana perluasan tenaga kerja tidak seimbang dan jumlah pengangguran

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki total pengurus 104 orang dengan laki-laki berjumlah 65 sedangkan perempuan 39 orang (Badan Pusat Statistik, 2023). Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut mereka mengupayakan dengan mengadakan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas sekolah kejuruan demi mempersiapkan tenaga kerja yang terampil, cakap, dan kompeten, kerjasama antar provinsi di bidang ketenagakerjaan, mengadakan lembaga yang terfokus pada pengembangan profesi, meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan pelatihan, memperluas kesempatan kerja, serta mempersiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing di dalam ataupun luar negeri.

## 2. Tepat Sasaran

Ketercapaian tujuan dilihat dari sejauh apa keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan selama program berjalan. Dari usaha Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan kegiatan pelatihan dan sertifikasi HRD, alat berat, menjahit, service AC, K3, kemudian menciptakan lembaga pengembangan profesi, memperbaiki sistem penginformasian lowongan pekerjaan dari perusahaan ke masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, hingga meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dapat kita lihat dari Tabel 4 ini.

**Tabel 4. Perbandingan Jumlah Lowongan Pekerjaan Terdaftar Kepulauan Riau Tahun 2021 dan 2022**

Kabupaten/Kota	Lowongan Pekerjaan Terdaftar	
	2021	2022
Karimun	2,185	237
Bintan	1,320	1,095
Natuna	0	-
Lingga	5	-
Kepulauan Anambas	0	-
Batam	26,268	6,792
Tanjungpinang	783	300
Jumlah total	30,561	8,424

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023

Tabel 4 menunjukkan bagaimana lowongan pekerjaan yang terdaftar pada tahun 2021 mencapai 30.561 banyaknya. Kemudian pada tahun 2022 lowongan pekerjaan yang terdaftar menurun menjadi 8.424. Penurunan ini memiliki pengaruh terhadap jumlah angka angkatan kerja di Kepulauan Riau yang ikut meningkat seperti data yang tertera pada Tabel 3. Artinya,

program penempatan tenaga kerja berjalan dengan baik serta penginformasian lowongan pekerjaan sudah cukup baik.

### **3. Tepat Waktu**

Ketepatan waktu adalah bagaimana penyelenggara mampu menjalankan programnya sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan (Fauziah et al., 2022). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau menjalankan program ini dalam setahun penuh dan akan dievaluasi setelahnya. Setelah melalui proses evaluasi maka akan dilakukan perancangan kembali untuk di tahun berikutnya dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan pada saat implementasi sebelumnya.

Ketepatan waktu penyelenggaraan program ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hanya saja yang membedakan adalah hasilnya, yakni persentase angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka yang berubah dari tahun ke tahun. Pada Tabel 2 dan Tabel 3 telah menunjukkan bagaimana perubahan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk yang mendapatkan pekerjaan di tahun 2022. Selisih angka pengangguran pada tahun 2020 dan 2021 hanya sebesar 0,43. Sedangkan, pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan yang lebih besar sebanyak 1,68 persen. Angka ini masih terlalu besar jumlahnya dibandingkan sebelum Covid-19 pada tahun 2019. Tahun 2020 hingga 2022 belum menunjukkan perubahan yang besar.

### **4. Tercapainya Tujuan**

Tercapainya tujuan merupakan indikator untuk melihat sejauh mana program terealisasi (Nuraida, 2019). Tujuan program ini adalah memberikan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sebuah kesempatan untuk bekerja dengan menyediakan pelatihan, informasi lapangan pekerjaan, serta perluasan tenaga kerja sesuai keahliannya. Secara sasaran memang keberadaan informasi lapangan pekerjaan berhasil mengingat pada Tabel 4 terjadi penyerapan akan lapangan pekerjaan oleh masyarakat. Namun hal tersebut nyatanya tak memberikan perubahan yang besar terhadap masyarakat Kepulauan Riau yang masih dalam status mencari pekerjaan.

**Tabel 5. Perbandingan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dan 2022**

Kabupaten/Kota	Pencari Kerja Terdaftar	
	2021	2022
Karimun	1,923	1,186
Bintan	3,145	2,127
Natuna	44	87
Lingga	175	154
Kepulauan Anambas	118	185
Batam	34,743	29,504
Tanjungpinang	1,001	796
Jumlah total	41,149	34,039

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023

Dapat dilihat dari data pada Tabel 5, jumlah pencari kerja terdaftar di tahun 2021 dan 2022 hanya berkurang sebanyak 7.110 sedangkan dari penyerapan lowongan pekerjaan yang terdaftar mencapai 22.137. Angka pengangguran ini bisa dipengaruhi oleh umur angkatan bekerja sudah bertambah generasi, pendidikan yang sudah tamat, atau bahkan dipecah. Data dari Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023 (2023), pada tahun 2022 Kepulauan Riau telah meluluskan pengangguran dari tingkat SMA sebanyak 27.027 dan pada tingkat perguruan tinggi sebanyak 2.905 orang. Salah satu faktor ini yang menyebabkan angka pengangguran tidak terlihat kemajuan yang pesat walaupun sudah terjadi penyerapan lowongan dengan baik. Oleh sebab itu, masih dibutuhkan upaya yang lebih besar dalam mengatasi pengangguran dari usia 15 tahun ke atas atau usia lulus sekolah. Pengangguran dari angkatan kerja muda juga menjadi permasalahan program perluasan lapangan pekerjaan di tahun 2021. Maka dari itu, pelatihan profesi atau keahlian wirausaha untuk pemuda harus dijalankan lebih gencar sehingga permasalahan pengangguran di Kepulauan Riau bisa berkurang pesat. Terkhusus pada inovasi program perluasan lapangan pekerjaan pada angkatan kerja muda masih menjadi target penting yang perlu ditingkatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tahun yang akan datang.

## **5. Perubahan Nyata**

Perubahan nyata dilihat dari dampak program terhadap kehidupan masyarakat. Dampak tersebut bisa memberikan perubahan yang lebih baik ataupun perubahan yang buruk (Andriani, 2018). Dalam pelaksanaan program perluasan dan penempatan tenaga kerja pelatihan dan sertifikasi pelatihan untuk keahlian tertentu telah dijalankan dengan kolaborasi antara Badan Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Kepulauan Riau

dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dari Jakarta. Dalam pelatihannya akan dilakukan uji kompetensi sehingga yang lulus akan mendapatkan dua sertifikat dari masing-masing badan tersebut.

Setiap peserta pelatihan yang lulus akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan di daerah setempat. Tak jarang dari pihak perusahaan akan menghubungi pelatihan tersebut bila membutuhkan tenaga. Penyerapan tenaga kerja tersebut dipantau melalui google form sehingga banyak lulusan BLKPP yang tidak hanya dikirim ke luar kota melainkan luar negeri juga. Pelatihan ini memberikan masyarakat peluang usaha dan pekerjaan berbekal keahlian, pengalaman, dan sertifikasi yang mereka miliki selama ini. Sebagai contoh, peserta pelatihan dan sertifikasi service AC membuka usaha perbaikan AC.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa program perluasan dan penempatan tenaga kerja di Kepulauan Riau oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berjalan cukup baik. Terdapat interaksi timbal balik terhadap upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja dengan kebutuhan pelatihan yang masyarakat inginkan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan saran terkait program pelatihan yang mereka inginkan dalam mengasah skill. Hal ini akan mendukung tujuan program dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kepulauan Riau. Pada sasaran dalam mempersiapkan lowongan pekerjaan terjadi penyerapan yang baik dari masyarakat. Program yang dirancang untuk satu tahun juga berjalan dengan baik sehingga dapat dilakukan evaluasi sebelum melanjutkan program di tahun berikutnya. Tercapainya tujuan terlihat dengan berkurangnya jumlah tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Riau. Untuk perubahan nyata, indikator ini dirasakan dampaknya oleh masyarakat lewat program pelatihan yang diwadahi oleh pemerintah sehingga mereka mampu membuka usahanya sendiri karena pengalaman yang sudah mereka miliki ataupun diberikan lapangan pekerjaan setelah lulus sertifikasi

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdul, M., Anwar, H. S., & Pikri, F. (2022). Efektivitas Program Inovasi Weselpos Cash to Account di Kantor Pos Tasikmalaya. *Jurnal Papatung*, 5(1), 18–29.
- Andriani, R. (2018). Efektivitas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. *JOM FISIP*, 5(1), 1–13.
- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektifitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Akademik*, 2(3), 1104–1116.

- Arlan, A. S. (2019). Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. *Jurnal Al 'iidara Balad*, 2(1), 37–43.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023*.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. (2022). *RENCANA KERJA 2022*.
- Hariyanto, E. (2020). *Pengangguran dan Krisis Ekonomi. Keuangan Umum BPPK*.
- Fauziah, W. R., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas Program Wirausaha Pemuda Dalam Upaya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen*, 2(14), 367–375.
- Nuraida. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 1(2), 148–165.
- Purba, E. F., & Simanjuntak, P. (2011). *Metode Penelitian. Percetakan Sadia*.
- Sugianto, & Permadhy, Y. T. (2020). Faktor Penyebab Pengangguran dan Strategi Penanganan Permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 2(3), 54–63. Sugianto, & Permadhy, Y. T. (2020). Faktor Penyebab Pengangguran dan Strategi Penanganan Permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 2(3), 54–63.
- Wulandari, U., & Simon, H. J. (2019). Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan. *Jurnal Publik Reform*, 5(1), 1–8.
- Wulandari, U., & Simon, H. J. (2019). Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan. *Jurnal Publik Reform*, 5(1), 1–8.